

**POLITIK ANGGARAN DPRD DALAM SINKRONISASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2018**

UNIVERSITAS ANDALAS

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

Fadzly Aldia Riefky

1310832004

Disetujui dijilid
Padang, 22/6/2021



UNTUK **JURUSAN ILMU POLITIK** BANGSA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

ABSTRAK

FADZLY ALDIA RIEFKY. 1310832004. Skripsi S1. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Judul Skripsi “Politik Anggaran DPRD dalam Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Kota Sawahlunto tahun 2018”. Dibimbing Oleh : Dr. Asrinaldi, M.Si dan Dr. Syamsurizaldi, SIP, SE, MM, Skripsi ini terdiri dari 80 halaman, dengan referensi : 4 buku, 21 jurnal dan 4 kabar online.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis politik anggaran yang terjadi. Objek dalam penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Sawahlunto, DPRD merupakan lembaga politik yang memiliki fungsi penting dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah khususnya di kota Sawahlunto. DPRD mempunyai fungsi legislasi, *budgeting*, dan pengawasan. Dalam penyusunan APBD, dokumen perencanaan dan penganggaran harus sinkron. Disinilah peran penting DPRD untuk menjaga sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun pada tahun 2018 kota Sawahlunto mengalami defisit anggaran dan juga akan mengadakan pilkada. Hal ini membuat proses politik terasa sangat terasa kental. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe studi kasus. Lokasi yang telah ditentukan dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi yang diambil membantu peneliti untuk memahami masalah penelitian. Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang peneliti dapatkan juga di uji keabsahannya melalui triangulasi sumber data. Menurut teori principal dan agent ada 4 tahapan dalam proses penganggaran yaitu : Eksekutive planning, legislative approval, executive implementation, dan expose accountability. Berdasarkan hasil penelitian antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran telah sinkron, namun proses negosiasi (*lobbying*) masih terasa sangat kental. Lembaga legislatif (DPRD) dalam pelaksanaan pokirnya menunjuk konsituennya untuk mengerjakan proyek-proyek yang pada akhirnya anggota DPRD menerima keuntungan dari pokirnya tersebut.

Kata Kunci : Politik Anggaran, Sinkronisasi, DPRD